

BAB III

SEJARAH KONFLIK DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH

Konflik etnopolitik di Republik Afrika Tengah merupakan dampak dari sejarah yang Panjang sejak Republik Afrika Tengah meraih kemerdekaannya dari Prancis. Dalam perjalanan perpolitikan di Republik Afrika Tengah, pemerintah telah dianggap gagal dalam mensejahterakan penduduknya, dimana masih banyak terjadinya disintegrasi ekonomi, politik dan sosial. Bukan hanya itu saja tapi juga terdapat perpecahan antar etnis dan suku yang mendalam. Akibat terdapatnya perpecahan pada masyarakat yang akhirnya membuat masyarakat terpecah menjadi dua kelompok antara Muslim dan Kristen. Kedua kelompok masyarakat ini masing-masing menciptakan kelompok bersenjata yang diciptakan untuk tujuan melindungi dan meraih kepentingan kelompok mereka sendiri. Kelompok tersebut adalah Seleka (muslim) dan Anti Balaka (Kristen).

Seleka merupakan Koalisi dari tiga kelompok pemberontak utama yaitu: *The Covention Patriotique da Salut du Kodro* (CPSK), *The Convention des Patriotes Pour la Justice et la Paix* (CPJP-Fondamentale), dan *The Union des Forces Democratiquess Pour le Rassemblement* (UFDR), Michel Djotodia adalah pemimpin kelompok pemberontak Seleka. Sedangkan, kelompok Anti balaka merupakan kelompok terbentuk dari kelompok pertahanan lokal dari setiap wilayah yang diciptakan untuk melindungi kepentingan suku dan etnis sendiri, mantan anggota tantara nasional Republik Afrika Tengah (FACA), dan juga pemuda desa yang pengangguran dan miskin. Kelompok Anti Balaka juga tidak memiliki struktur komando pusat yang jelas.

A. Faktor-faktor konflik

1. Perbedaan Agama

Orang-orang di Republik Afrika Tengah terbagi kedalam puluhan suku dan agama. PBB memperkirakan bahwa terdapat 51% Katolik, 29% Protestan, 10% Islam, dan 10% Animisme. Namun hal tersebut diragukan karena masih adanya alkulturasi antara agama-agama tersebut dengan kepercayaan lokal di Republik Afrika Tengah. Dimana para penganut agama tersebut masih mempraktekan agama masing-masing tanpa melepaskan keyakinan agama tradisional di Republik Afrika Tengah. (IEEE.ES, 2016, pp. 3-4)

Masyarakat terbiasa melakukan perkawinan campuran antara suku dan agama satu sama yang lain. Namun hal tersebut tetap tidak bisa untuk mengahapus rasa saling tidak percaya antara masyarakat di Republik Afrika Tengah yang telah lama tersimpan dalam struktur masyarakat itu sendiri. Hal tersebut telah tercipta sejak lama, bahkan sebelum Prancis menjajah negeri ini.

Hal tersebut dipicu oleh perdagangan budak yang dilakukan Oleh suku-suku dibagian utara yang telah memeluk agama Islam dan orang-orang arab yang melakukan perdagangan budak. Dimana pada masa itu masyarakat yang berada dibagian selatan dan beragama non-Muslim menjadi budak yang diperjualbelikan. Hal tersebut menjadikan luka yang sangat mendalam dan tidak terlupakan bagi masyarakat dibagian selatan Republik Afrika tengah yang mayoritas non-muslim dan membuat masyarakat dibagian utara yang mayoritas Islam tidak disukai oleh masyarakat di bagian selatan.

Pada saat Prancis menjajah negeri ini Prancis melakukan berbagai kebijakan untuk meraih keuntungan dengan salah satu cara melakukan praktek tanam paksa dan menjadikan masyarakat sebagai pekerja paksa untuk menekan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Prancis. Dalam praktek kebijakannya Prancis lebih menguntungkan sejumlah suku, termasuk suku pengembala Muslim Mbororo. Prancis memberikan hak istimewa pada suku tersebut untuk mengembalakan ternak mereka dikawasan Bouar (wilayah dibagian Barat Republik Afrika Tengah) dimana pada saat itu daerah tersebut telah lama dikuasai kelompok petani dari suku Gbaya (29% dari jumlah populasi Republik Afrika Tengah). Suku Gbaya menuding bahwa suku Mbororo telah merampas wilayah mereka. Hal tersebut membuat citra Muslim di Republik Afrika Tengah semakin buruk. (IEEE.ES, 2016, pp. 4-5)

2. Ketimpangan kesejahteraan

Sejak meraih kemerdekaannya pada tahun 1960, sering sekali Para pemimpin Republik Afrika Tengah melakukan politik nepotisme dimana para pemimpin ini hanya didukung oleh kelompok dan suku tertentu. Mereka menggunakan suku dan agama sebagai alat untuk tetap berkuasa dan meperkuat posisi politik mereka. Serta menciptakan indititas politik sesuai suku dan etnis mereka sendiri. Sehingga memicu ketegangan antara suku dan etnis. Seperti: 1) Andre Kolingba yang didukung oleh etnis dan sukunya sendiri yaitu Yakoma, dengan memberi mereka posisi-posisi penting dimiliter dan pemerintahan. 2) Ange Felix Patasse yang didukung oleh Sara-Kara. termasuk Francois Bozize yang didukung oleh suku Gbaya. (Siradag, 2016, p. 88)

Francois Bozize sendiri dalam masa pemerintahannya menerapkan politik patronase. Dimana

Francois Bozize memberikan posisi-posisi penting di militer dan pemerintahan kepada keluarga dan sukunya. Francois Bozize membuat tingkat diskriminatif meningkat, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang merugikan di wilayah bagian utara Republik Afrika Tengah yang mayoritas penduduk beragama Muslim. Para elit politik pada masa Francois Bozize lebih mementingkan untuk mengejar kepentingan pribadi dengan menggunakan kekuasaan yang pada akhirnya merusak tatanan politik, ekonomi, dan sosial.

Hal tersebut terbukti dengan masih minimnya pembangunan fasilitas-fasilitas publik dibagian Utara negara ini, seperti masih minimnya rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur umum lainnya. Hal-hal tersebutlah yang membuat munculnya masalah keamanan dan konflik etno-politik di Republik Afrika Tengah. (Siradag, 2016, p. 89)

3. Memperebutkan Sumber Daya Alam

Konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah Juga dilatarbelakangi oleh perebutan untuk menguasai sumber daya alam yang berada di Republik Afrika Tengah. Negara ini merupakan negara penghasil berlian. Pengendalian dan penguasaan sumber-sumber daya alam oleh kelompok pemberontak atau kelompok tertentu telah lama dipraktikkan. Sejak 2013 kelompok pemberontak selesa telah menguasai hampir seluruh sumber daya alam yang berada di Republik Afrika Tengah. dengan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sumber daya alam dan juga mengenakan pajak atas perdagangan ternak.

Dibawah pemerintahan Michel Djotodia, kelompok pemberontak Selesa menjadikan kekuasaan untuk melegalkan tindakan penjarahan, pengendalian dan penguasaan sumber-sumber daya alam hanya untuk

mengayakan diri sendiri atau para pemimpin kelompok Seleka. Selain itu kekuasaan juga digunakan secara sistimatis untuk mengambil keuntungan dalam penjualan sumber-sumber daya alam. seperti contoh penjualan berlian. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan banyaknya para pejuang Seleka yang terlibat dalam perdagangan berlian di Republik Afrika Tengah. Seleka juga membuat sistem administrasinya sendiri secara sistimatis untuk mengorganisir para penambangnya sendiri dan juga untuk memeras penambang lokal dengan alasan uang keamanan.

Dibarat, setelah milisi anti-balaka berhasil mengusir penduduk Muslim yang secara sistimatis terlibat dalam penguasaan dan perdagangan sumber daya alam seperti berlian, kelompok Anti Balaka merebut kendali atas beberapa tambang berlian. Dalam beberapa kasus, komandan anti-balaka mengambil peran untuk mengumpulkan berlian. Pada tahun 2015, anggota Anti Balaka terus hadir di beberapa lokasi penambangan berlian dan juga memperoleh izin penambangan (Dukhan, *The Central African Republic crisis*, 2016)

B. Kelompok- kelompok yang terlibat konflik

1. Kelompok Seleka

Dalam Bahasa Sango “Seleka” berarti aliansi. Kelompok Seleka terbentuk atas ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat pada masa pemerintahan Presiden Francois Bozize yang melakukan politik patronase. Kelompok Seleka merupakan Alisasi dari tiga kelompok yaitu: *The Covention Patriotique da Salut du Kodro* (CPSK) yang dipimpin oleh Mohammed Moussa Dhaffane, *The Convention des Patriotes Pour la Justice et la Paix* (CPJP-Fondamentale) yang dipimpin oleh Noureddine Adam, dan *The Union des Forces Democratiquess Pour le Rassemblement* (UFDR) yang

dipimpin oleh Michel Djotodia. Michel Djotodia dipilih untuk menjadi pemimpin kelompok Seleka.

Pada bulan Maret 2012 di Niamey ibukota Niger telah terjadi sebuah pertemuan rahasia antara para perwakilan kelompok-kelompok pemberontak di Republik Afrika Tengah. Pada pertemuan tersebut terdapat Michel Djotodia perwakilan dari UFDR, Joachim Kokate perwakilan dari CPJP akan tetapi. Pertemuan tersebut gagal dan tidak menghasilkan apapun. Hal tersebut membuat terjadi perpecahan diantara beberapa pemimpin CPJP. Perpecahan pertama terjadi pada Juni 2012 dimana Mohammed Moussa Dhaffane membentuk kelompoknya sendiri yaitu CPSK. Pada 10 Juli Nouredine Adam juga menyatakan keluar dari CPJP dan menciptakan kelompoknya sendiri yaitu (*CPJP-Fondamentale*).

Pada Agustus 2012 kedua pemimpin kelompok ini Mohammed Moussa Dhaffane dan Nouredine Adam melakukan pertemuan di N'Djamena untuk membahas tentang penggabungan dan menciptakan koalisi pemberontak secara Bersama-sama (Seleka). Namun nama “Selaka” sendiri baru resmi digunakan pada 15 September 2012. Barulah pada awal bulan Desember 2012 Mohammed Moussa Dhaffane dan Nouredine Adam menjalin kerja sama dengan *The Union des Forces Democratiquess Pour le Rassemblement* (UFDR) pimpinan Michel Djotodia.

Ketika kelompok Seleka Berhasil menguasai beberapa wilayah mereka juga membuat aliansi jangka panjang dengan kelompok pemberontak lainnya dinegara Republik Afrika Selatan terutama dengan kelompok yang memiliki pejuang dan angkatan bersenjata. Seperti kerja sama dengan *Front populaire pour le redressement* (FPR) dan *Front démocratique du peuple centrafricain* (FDPC). (Weyns, Hoex, Hilgert, & Spittaels, 2014, pp. 14-15)

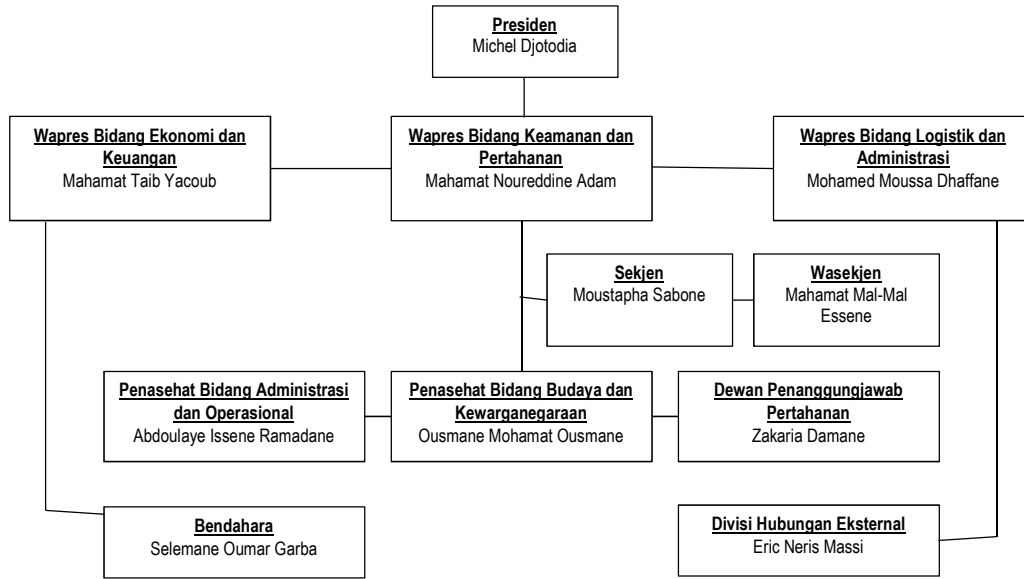
a. Perkiraan Kekuatan Seleka

Menurut Uni Afrika (AU), Milisi kelompok Seleka beranggotakan 10.000-20.000 pejuang sebelum mereka tiba di Bangui. Sedangkan PBB menyatakan bahwa pada serangan pertama mereka pada 10 Desember 2012, Seleka berjumlah sekitar 1.600 pejuang dan ketika kelompok Seleka sampai digerbang ibukota Bangui jumlah mereka meningkat sekitar 3.500 pejuang. Sumber-sumber lain masih mengacu bahwa kelompok Seleka masih beranggotakan sekitar 5.000, didukung oleh sekitar 10.000 tentara bayaran asing. Di antara para tentara bayaran ini banyak yang bertempur di bawah perintah pemimpin pemberontak Chad Anti-Deby yaitu pimpinan Jendral Baba Ladde. (Weyns, Hoex, Hilgert, & Spittaels, 2014, pp. 15-16)

Jumlah anggota Seleka meningkat pesat setelah serangan pertama mereka pada bulan Desember 2012, karena gerakan tersebut secara aktif merekrut para penduduk lokal dari wilayah-wilayah yang mereka kendalikan. Rekrutmen ini berhasil merekrut para anggota baru, sebagian besar anggota baru bergabung karena dijanjikan uang atau hasil dari barang jarahan. Pada saat Seleka berhasil menduduki kota Bangui diperkirakan kekuatan kelompok ini sekitar 4.000 pejuang. Mohamed Moussa Dhaffane secara khusus dilaporkan terlibat dalam perekrutan untuk memperkuat posisi politiknya, hal itu dikarenakan Mohamed Moussa Dhaffane hanya memiliki anggota pejuang yang tidak terlalu banyak. Pada bulan Juli 2014, sekitar 2.000 pejuang Seleka masih ada di Bangui dan bernaung di tiga kamp: camp Béal, kamp RDOT, dan kamp BSS. (Weyns, Hoex, Hilgert, & Spittaels, 2014, pp. 15-16).

b. Struktur organisasi kelompok Seleka

Bagan 3.1 Bagan Struktur Kelompok Seleka



Sumber: *Final report of the Panel of Experts on the Central African Republic established pursuant to Security Council resolution 2127*

Pada 4 Agustus 2014 kelompok Seleka berganti nama menjadi *Front démocratique du peuple centrafricain* (FPRC), karena pada Januari 2014 Michel Djotodia Mudur dari kursi kepresidenan Republik Afrika Tengah. hal itu membuat para komandan Kelompok Seleka yang berada di wilayah Timur negara itu semakin tidak Percaya kepada wakil-wakil Mereka di Bangui. Mereka menuduh bahwa para wakil mereka yang berada di Bangui hanya mementingkan kepentingan sendiri tanpa memikirkan mereka yang berada di wilayah Timur. Ditambah lagi terjadinya perpecahan antara para pemimpin kelompok Seleka. Dimana Noureddine Adam memberhentikan Mohamed Moussa Dhaffane dan Mahamat Taib Yacoub dengan tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi, Noureddine Adam pun menjadi pemimpin dari menjadi *Front démocratique du peuple centrafricain* (FPRC). (Weyns, Hoex, Hilgert, & Spittaels, 2014, pp. 16-18)

c. Kelompok-Kelompok Pendukung Seleka.

1) *The Union des Forces Democratiquess Pour le Rassemblement (UFDR)*

kelompok ini terbentuk sebagai koalisi dari kelompok-kelompok bersenjata yang sudah ada sebelumnya dan dikenal secara lokal. kelompok-kelompok ini juga di anggap sebagai kelompok pertahanan lokal. Kedatangan Abakar Sabone, dan Michel Djotodia, mereka berdua adalah para pengusaha, politikus dan mantan liberator yang memungkinkan milisi-milisi ini untuk berorganisasi sebagai 'kelompok pemberontak' yang tepat dan menyuarakan tuntutan politik terhadap pemerintah pusat. Para milisi dari kelompok ini telah dilatih secara militer dan menjadikan mereka sebagai milisi-

milisi yang sangat terlatih dan terampil akibat sering terjadinya konfrontasi dengan pasukan pemerintah.

Terdapat tiga faktor yang menyebabkan kelompok ini melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan mantan presiden Francois Bozize, yaitu: 1) pada pertengahan tahun 2004, setelah kembalinya Abakar Sabone dan mantan liberator lainnya ke Republik Afrika Tengah ke bagian Utara akibat Tidak puas karena telah dikesampingkan oleh mantan Presiden Bozizé, yang mereka bantu untuk meraih tampuk kekuasaan pada tahun 2003. 2) meningkatnya rasa ketidakpuasan diantara masyarakat etnis Gula dengan rezim Bozizé. 3) pada bulan April 2006, Pasukan pemerintahan menghancurkan desa-desa disekitar Tiringoulou di provinsi Vakaga. membunuh sebagian masyarakat karena dianggap membantu dan bersekongkol dengan pemberontak yang berasal dari Chad. (Weyns, Hoex, Hilgert, & Spittaels, 2014, pp. 81-82)

2) *The Covention Patriotique da Salut du Kodro (CPSK) dan The Convention des Patriotes Pour la Justice et la Paix (CPJP-Fondamentale)*

Pada mulanya kelompok ini merupakan bagian dari kelompok *Convention des patriotes pour la justice et la paix* (CPJP). CPJP sendiri dibentuk pada pertengahan tahun 2008. terjadi perpecahan antara pemimpin kelompok ini, sehingga membuat terjadinya perselisihan dalam jajaran pemimpin CPJP. Pada akhirnya membuat Mohammed Dhaffane dan Noureddine Adam meninggalkan CPJP dan mereka membentuk kelompok mereka sendiri-sendiri, yaitu: *The Covention Patriotique da Salut du Kodro*

(CPSK), *The Convention des Patriotes Pour la Justice et la Paix (CPJP-Fondamentale)*. (Weyns, Hoex, Hilgert, & Spittaels, 2014, p. 82)

3) *Front Populaire Pour le Redressement (FPR)*

Kelompok ini merupakan kelompok yang berasal negara tetangga Chad. Kelompok ini didirikan dan dipimpin oleh Jendral Baba Ladde yang pada mulanya dibentuk untuk bertujuan menjatuhkan rezim presiden Chad Idriss Deby. Mereka mengklaim melindungi kepentingan suku pengembala Chad Peuhl. Pada tahun 2008, gerakan itu menemukan tempat perlindungan di Nana-Grebizi sebuah Provinsi di Republik Afrika Tengah setelah mendapat serangan dari pemerintah Chad. Di sana Jendral Baba Ladde mendeklarasikan untuk menggulingkan rezim pemerintahan Republik Afrika Tengah Dan Chad.

Kelompok ini pernah tercatat terdiri dari 3.000 pejuang, Satu bulan kemudian di Dobaya, Moyen Chari, Chad mereka berkumpul dan Para pejuang ini pergi ke Ippy dan Kaga-Bandoro, dimana mereka banyak yang bergabung dengan kelompok pemberontakan Seleka. Setelah kudeta pada tahun 2013, para pejuang ini dikerahkan ke Provinsi Mambere-Kadei, dimana Kolonel Saad, salah satu pemimpin FPR, menjadi komandan zona di Berberati. (Weyns, Hoex, Hilgert, & Spittaels, 2014, p. 84)

4) *Front Democratique du Peuple Centrafricain (FDPC)*

Kelompok ini didirikan dan dipimpin oleh Abdoulaye Miskine. Dia merupakan orang kepercayaan mantan Presiden Ange Felix Patasse.

Pada masa pemerintahan Ange Felix Patasse. Dia menjabat sebagai kepala keamanan kepresidenan. Dia telah berperang melawan Francois Bozize bahkan sejak sebelum Francois Bozize melakukan kudeta dan menjadi Presiden di Republik Afrika Tengah pada tahun 2003.

Aliansi antara FDPC dan kelompok Seleka sangatlah singkat. Dalam sebuah keputusan yang dibuat oleh kelompok Seleka yang diterbitkan pada 12 Desember 2012 untuk meminta Miskine bergabung. Setelah serangan terhadap kota Ndele, FDPC mendapat kepercayaan untuk mengontrol wilayah Kabo dan Abba, setelah kedua kota itu diambil oleh pejuang kelompok Seleka. Tak lama setelah kudeta pada 24 Maret 2013, Abdoulaye Miskine memutuskan keluar dari aliansi kelompok Seleka, dan mengancam akan mengangkat senjata untuk melawan Seleka. Hal disebabkan oleh dua faktor. Pertama, dia tidak ingin menyerahkan kontrolnya yang menguntungkan atas wilayah Abba ke kelompok Seleka yang lain. Kedua, ia dikabarkan takut akan serangan pembalasan oleh mantan pendukung Francois Bozize yang membelot dan mendukung kelompok Seleka. (Weyns, Hoex, Hilgert, & Spittaels, 2014, p. 85)

2. Kelompok Anti Balaka

Kelompok ini terbentuk akibat dari tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok Seleka kepada masyarakat non-muslim. Kelompok ini terbentuk dari aliansi-aliansi kelompok pertahanan lokal dan mantan royalis Francois Bozize (FACA dan mantan pengawal presiden). Kelompok Pertahanan lokal ini dahulu merupakan kelompok yang dibentuk dari kalangan-kalangan masyarakat yang mayoritas beragama

Kristen dan animisme. Dimana kelompok ini memiliki komandan lokal masing-masing yang bertujuan untuk melindungi suku dan etnis sendiri, dari serangan kelompok pemberontak bersenjata Seleka. Sedangkan mantan Royalis Francois Bozize yang seluruhnya terdiri dari mantan anggota FACA dan Pengawal Presiden yang bertujuan untuk kembali berkuasa dengan cara apapun. Kelompok Anti Balaka ini mendapat dukungan dari mantan presiden Francois Bozize. Francois Bozize juga dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh terhadap kelompok ini.

Kelompok Anti Balaka yang melakukan serangan besar terhadap kota Bangui pada 5 Desember 2013 yang telah dikuasai oleh kelompok Seleka dan menjadikan warga sipil Muslim sebagai sasaran. Dalam penyerangan ini kelompok Anti Balaka terdiri dari dua golongan yaitu: 1) terdiri dari beberapa kelompok milisi pertahanan lokal masyarakat, 2) Para royalis yang setia kepada mantan Presiden Francois Bozize, yang terdiri dari mantan Anggota FACA dan pengawal presiden yang telah aktif melakukan serangan ke Seleka sejak akhir 2012, juga ikut serta dalam serangan ini pemuda desa yang pengangguran dan miskin, yang dikendalikan dari Paris oleh Francois Bozize. (Weyns, Hoex, Hilgert, & Spittaels, 2014, p. 44)

a. Perkiraan Kekuatan Anti Balaka

Jumlah para pejuang aktif milisi Anti Balaka sangat sulit untuk diperkirakan. hal tersebut dikarena serangan Anti Balaka sering melibatkan orang-orang sipil dan pemuda miskin dan pengangguran yang hanya bergabung dalam kelompok ini ketika kelompok ini memulai serangan-serangan pembalasan didesa mereka saja. Bahkan salah satu pemimpin dari kelompok ini sempat mengatakan kepada IPIS bahwa seluruh penduduk Kristen adalah bagian dari gerakan ini.

Kepala Staf Anti Balaka yaitu Captain Gilbert Kamezoulaye sempat mengatakan pada bulan Februari 2014 bahwa kelompok Anti Balaka beranggotakan 52.000 pejuang. Sementara itu Koordinator Umum kelompok Anti Balaka yaitu Patrice Edouard Ngaissona pada minggu yang sama juga mengatakan bahwa kelompok tersebut beranggotakan 70.000 pejuang. Menurut BINUCA, Jumlah anggota kelompok ini kemungkinan dibesar-besarkan dan mencakup orang-orang sipil yang tidak bersenjata yang hanya sesekali bergabung dalam pertempuran atau serangan kelompok Anti Balaka. (Weyns, Hoex, Hilgert, & Spittaels, 2014, p. 45)

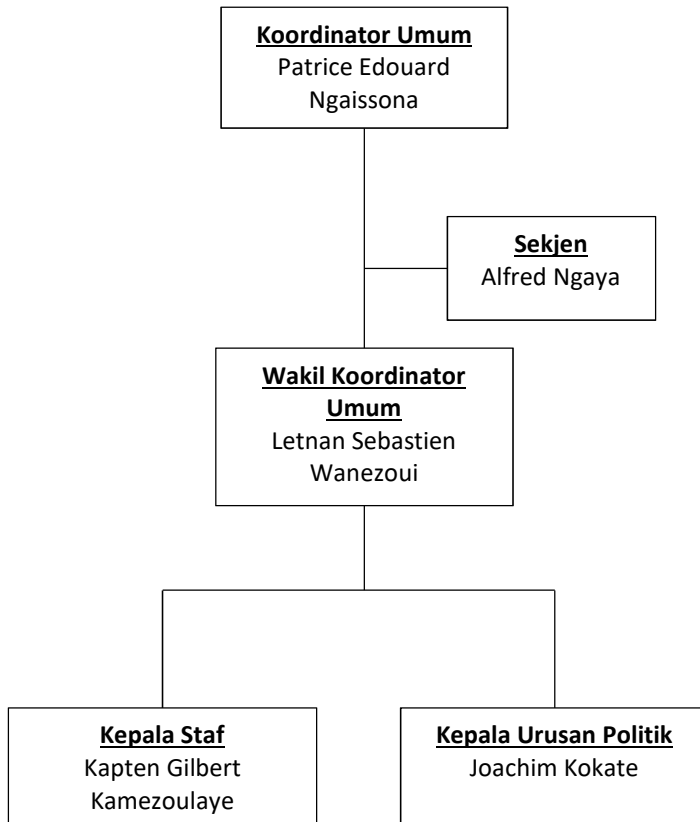
b. Struktur Organisasi Kelompok Anti Balaka

Sulit untuk menemukan hubungan yang jelas antara kelompok-kelompok ini dan gerakan ini tidak memiliki struktur komando pusat yang jelas. Seiring berjalannya waktu Pengaruh Francois Bozize mulai berkurang dan membuat koordinasi antara kelompok-kelompok Anti Balaka yang berbeda pimpinan menjadi tidak terkoordinir dengan baik. Kelompok Anti Balaka ini terbagi dalam dua kelompok besar dan memiliki kepimpinan masing-masing. Yang pertama,

merupakan Kelompok pimpinan Patrice Edouard Ngaissona, markas mereka terletak dikawasan Boy Rabe di Bangui, dan mereka beroperasi di utara kota, sampai ke kota Damara. Mereka juga tampaknya memiliki pengaruh di Boda dan Carnot. Yang kedua, Kelompok pimpinan Letnan Sebastien Wenezoui. Kelompok ini mengontrol bagian timur provinsi Lobaye di sekitar Mbaiki, dan juga mengontrol pelabuhan sungai Moundoumba, selatan Bangui.

Kedua kelompok tersebut memiliki hubungan yang tidak harmonis, hal tersebut diperparah dengan buruknya hubungan antara Patrice Edouard Ngaissona dan Letnan Sebastien Wenezoui. Hal tersebut dipicu oleh keinginan Patrice Edouard Ngaissona untuk mengembalikan Francois Bozize ke tampuk kekuasaan. Pada bulan Mei 2014, para pemimpin lokal Anti Balaka lebih memilih Letnan Sebastien Wenezoui untuk menjadi koordinator umum kelompok Anti Balaka tingkat nasional. Namun hal tersebut ditentang oleh Patrice Edouard Ngaissona dan menyatakan bahwa pemilihan tersebut tidaklah sah. Pada pertengahan Juni 2014 Letnan Sebastien Wenezoui akhirnya mengalah dan lebih memilih menjadi wakil dari Patrice Edouard Ngaissona, namun Kolaborasi antara kedua pemimpin itu tidak bertahan lama. (Weyns, Hoex, Hilgert, & Spittaels, 2014, pp. 46-50)

Bagan 3.2 Struktur Organisasi Anti-Balaka Mei 2014



Sumber: *Final report of the Panel of Experts on the Central African Republic established pursuant to Security Council resolution 2127*

Tabel 3.1 Nama Komandan dan Wilayah yang Dipimpinnya
Tahun 2014

NO	KOMANDAN	WILAYAH
1	Rodrique Ngaibona(Andilo)	Ouham
2	Alfred Yekatom(Rambhot).	Area Boeing dekat dengan bandara Bangui, Kota Bimbo, Jalan menuju Mbaiki. Dan Jalan Menuju Boda
3	Letnan Konat	Bangui bagian Utara
4	Ludovic Namsio Emotion	Bangui bagian Timur, Hulu Sungai Oubangui, jalur Transportasi sungai ke Timur menuju Kouango,
5	Endjilo(Sorcier)	Batangfo
6	Letnan Maxime Mokom Gawaka	Bour
7	Joseph Kema	Bossangoa

NO	KOMANDAN	WILAYAH
8	Richard Bezouane	Bozoum
9	Soussou Habib	Boda
10	Sylvestre Yagoussou	Damara
11	Chrysostome Berba Yapele	Berberati
12	Aristide Bakefe	Carnot
13	Seraphin Keanssem	Boali
14	Sylvain Beorofie	Bossemebele
15	Nice Demawanesse	Gamboula
16	Kolonel Aron Wilibona	Pos-pos diperbatasan dari Beleko ke Bouar

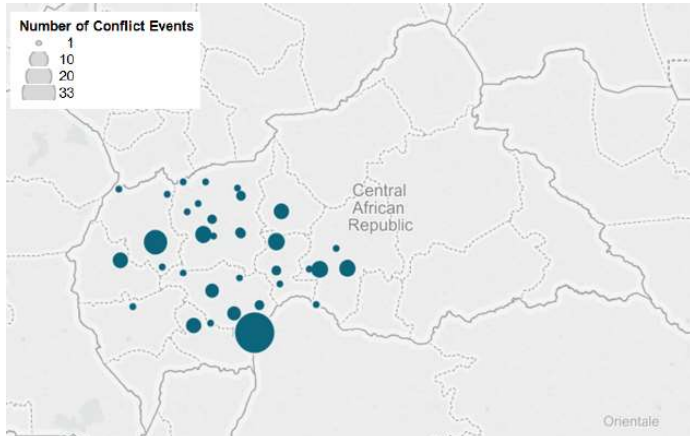
Sumber: *Mapping Conflict Motives: The Central African Republic*

3. Peta Pertempuran Antara Anti Balaka Dan Seleka

Sejak kemunculan Anti Balaka pada tahun 2013, telah terjadi pertempuran sebanyak 128 pertempuran antara Anti Balaka dan Seleka. Hampir 30% dari pertempuran ini terjadi di Bangui. Karena Banyak sekali Markas-markas pasukan Seleka yang terletak di Bangui, seperti Camp Beal, Camp Kasai dan Camp RDOT, yang telah menjadi sasaran utama dari serangan kelompok Anti Balaka. Selain itu, Anti Balaka

juga mengkampanye untuk melakukan serangan balasan terhadap masyarakat Muslim diberbagai daerah. Seperti serangan-serangan yang terjadi di kota Bozoum, Baoro dan Bossemptele. (Raleigh & Dowd, 2015)

Gambar 3.1 Peta Pertempuran Anti Balaka dan Seleka Agustus 2013- September 2014

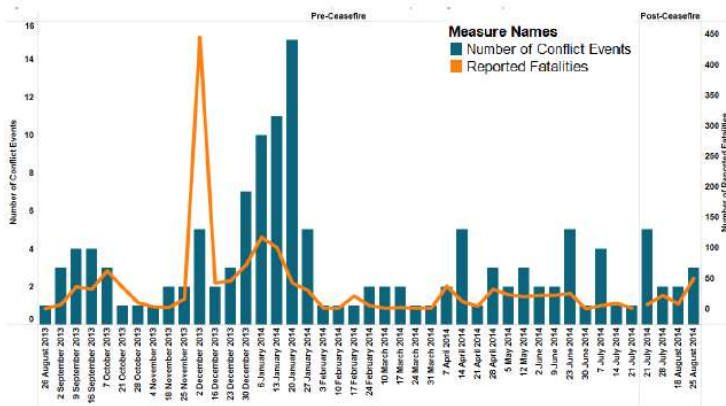


Sumber: COUNTRY REPORT: CENTRAL AFRICAN REPUBLIC January 2015

Pada 23 Juli 2014, Anti Balaka dan Seleka menandatangani perjanjian gencatan senjata di Brazzaville, Republik Kongo. Untuk menghentikan semua bentuk kekerasan antara Anti Balaka dan Seleka. Meskipun perjanjian gencatan senjata telah ditandatangani namun, data yang didapat dilapangan belum menunjukkan penurunan yang signifikan dalam jumlah korban kekerasan dan korban jiwa. Ketidakefektifan gencatan senjata ini tidak mengherankan karena perjanjian ini tidak memberikan hukum yang tegas jika salah satu pihak tidak melaksanakan gencatan senjata, pelucutan senjata, dan demobilisasi dan reintegrasi

(DDR). Selain itu, para pemimpin Anti Balaka dan Seleka tidak dapat mengontrol penuh semua tindakan yang dilakukan oleh para pejuangnya. (Raleigh & Dowd, 2015)

Grafik 3.1 Jumlah Korban Jiwa Pasca Perjanjian



Sumber : COUNTRY REPORT: CENTRAL AFRICAN REPUBLIC January 2015

Jika kita melihat data diatas, maka pasca perjanjian gencatan senjata antara Anti Balaka dan Seleka masih menunjukan jumlah korban yang banyak. Pada pertempuran 25 Agustus 2015, antara Anti Balaka dan Seleka masih memakan korban jiwa sebanyak 50 orang. Dimana hal tersebut dianggap masih kurang memberikan dampak yang signifikan.

C. Kronologi Konflik

Pada 11 Desember 2012, kelompok Seleka yang berasal dari bagian Utara Republik Afrika Tengah melancarkan serangan bersenjata besar-besaran di Timur laut negara itu terhadap rezim Francois Bozize. Kelompok ini mendapat dukungan dari kelompok bersenjata yang

berasal dari Chad. Mereka menguasai beberapa kota dan desa di timur dan maju hingga Sibut (180 km dari Bangui). 11 Januari 2013, setelah Seleka berhasil menguasai Bangui, Presiden Bozizé dan kelompok Seleka menandatangani Perjanjian Libreville untuk membentuk Pemerintah Kesatuan Nasional. 24 Maret 2013, Para pemberontak kelompok Seleka melanggar perjanjian dan melakukan kudeta terhadap Francois Bozize yang melarikan ke Kamerun, kemudian Michel Djotodia pemimpin kelompok Seleka memproklamkan dirinya sebagai presiden, dan membubarkan Pemerintah Kesatuan Nasional dan Majelis Nasional, membekukan konstitusi dan mengumumkan bahwa dia akan memerintah dengan dekrit setidaknya selama tiga tahun. Selama periode ini, kelompok Seleka melakukan pelanggaran HAM terhadap penduduk sipil.

Pada 13 April 2013, Karena mendapat tekanan dari Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Tengah (ECCAS), Dewan Transisi Nasional akhirnya didirikan dan Michel Djotodia ditunjuk satu-satunya kandidat sebagai Ketua Dewan transisi. 13 Juni 2013, Pemerintahan Persatuan Nasional yang Baru dibentuk. Michel Djotodia menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Presiden Transisi. 18 Agustus 2013, Michel Djotodia secara resmi dilantik sebagai Kepala Negara Transisi dan berkomitmen untuk mengadakan pemilihan nasional dalam 18 bulan kemudian. 13 September 2013, Presiden Djotodia secara resmi membubarkan koalisi Seleka, tetapi Pengumuman tentang pembubaran yang dilakukan Michel Djotodia tidak memiliki efek dalam hal mengakhiri pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kelompok Seleka. Pada 5 Desember 2013, Anti Balaka mengkoordinasi serangan ganas terhadap populasi Muslim di ibukota, di mana lebih dari 1.000 warga sipil meninggal.

10 Januari 2014, Michel Djotodia dan Perdana Menteri Nicolas Tiangaye, dipaksa mengundurkan diri setelah mengikuti pertemuan ECCAS di N'Djamena. Pada

23 Januari Catherine Samba Panza pada ditunjuk oleh Dewan Transisi Nasional untuk menggantikan Michel Djotodia. Periode Januari sampai Maret 2014, pasca setelah Michel Djotodia mengundurkan diri, siklus pembalasan terhadap masyarakat muslim meningkat di Bangui dan di barat daya negara itu. Serangan brutal oleh kelompok Anti Balaka memaksa puluhan ribu masyarakat Muslim untuk melarikan diri ke negara-negara tetangga. 23 Juli 2014, Pihak-pihak yang berkonflik di Republik Afrika Tengah mengadakan pertemuan, pertemuan tersebut didukung oleh Presiden Republik Kongo Denis Sassou Nguesso, untuk menandatangani Perjanjian Brazzaville membahas tentang Rekonsiliasi Nasional. Oktober 2014, Gejolak kekerasan disekitar Bangui menyebabkan pembicaraan internasional. mediator Denis Sassou Nguesso dan pihak-pihak di Republik Afrika Tengah yang terlibat dalam pertempuran telah mencapai suatu kesepakatan untuk mengadakan Forum di Bangui pada Januari 2015 sebagai bentuk usaha rekonsiliasi nasional. Akhir 2014, Kelompok Seleka mulai terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil akibat hasil dari perpecahan internal dan persaingan untuk memperebutkan wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya alam

26 Januari 2015: Negosiasi antara milisi Anti Balaka yang diwakili oleh Joachim Kokate dan sebuah faksi bekas kelompok Seleka yaitu *Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique* (FPRC) yang dikepalai oleh Nourredine Adam dan Michel Djotodia di Nairobi, menandatangani perjanjian Nairobi, dan didukung oleh Denis Sassou Nguesso, perjanjian itu termasuk ketentuan tentang demobilisasi, pelucutan senjata dan reintegrasi (DDR), amnesti untuk semua pelaku pelanggaran dan pemindahan otoritas transisional saat ini. Otoritas transisional CAR dan komunitas internasional menolak kesepakatan karena mengecualikan mereka dari negosiasi dan merusak perjanjian yang ada.

4-11 Mei 2015: Forum Rekonsiliasi Bangui diselenggarakan dan 600 peserta menyepakati serangkaian rekomendasi seputar empat tema: perdamaian dan keamanan, keadilan dan rekonsiliasi, pemerintahan dan pembangunan ekonomi dan sosial. 10-11 Oktober 2015: Puluhan pejuang FPRC berjalan dari timur laut bagian Republik Afrika Tengah ke kota Sibut (sekitar 160 km Bangui) mengancam otoritas transisional di Bangui, tetapi Pasukan internasional menghentikan perjalanan mereka menuju Bangui. (Dukhan, *The Central African Republic crisis*, 2016, pp. 1-2)